

Transformasi Politik ke Jalur Dakwah: Studi Analitis Politik Masyumi tahun 1960-1967

Nelly Indrayani*, Budi Purnomo

nelly.indrayani@unja.ac.id, masbudil961@gmail.com

Universitas Jambi

Abstract

The issue of state ideology became the arena for debate among the parties during the early days of independence. Masyumi is the only Islamic party that fights for Islam as the state ideology. On the other hand, nationalist or communist parties refuse to make Islam the foundation of the state. Changes in the struggle for Islamic ideology are no longer carried out through political channels but by transforming into da'wah channels. This study aims to reveal the political transformation to the da'wah path, using historical methods, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography, which uses the concept of the history of thought, namely the change movement carried out by a group of political elites in the struggle for the basic ideology of the state. Through the disclosure of the historical method, it was found that the results of the research showed that Soekarno's old order period took steps to take part in government power, which caused controversy among Islamic politicians. It can be seen that Masyumi was in opposition and rejected the Old Order's ideas. According to Soekarno, this action was an obstacle to the course of the revolutionary process. Based on the Presidential Decree No. 200 of 1960, Soekarno disbanded Masyumi. The struggle for Islam does not stop through political forums, but chooses to move on the path of da'wah. Basically, the Masyumi leaders have attempted to rehabilitate the Masyumi party during the New Order era. However, the government is concerned that the use of Islamic labels in politics will become an obstacle to achieving stability. Even though the Indonesian Muslim Party has been formed with the permission of the government, it is still felt that there is interference with Islam. Even this intervention strengthened the involvement of the Masyumi people in PRRI, which the government considered treason. Based on this, there is no other way to go is to move to the path of preaching by forming the Indonesian Islamic Da'wah Council. It can be concluded that firstly for the Masyumi people, before da'wah through political channels, now politics through da'wah channels. The second starts with implementing Islam through formalization, institutionalizing it through political parties, towards a movement that applies Islamic values without having to institutionalize it through parties, because that chooses the path of da'wah.

Keywords: Masyumi, Transformation, Da'wah

Abstrak

Persoalan ideologi negara menjadi ajang perdebatan di antara partai-partai masa awal kemerdekaan. Masyumi satu-satunya partai Islam memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara. Di sisi lain partai nasionalis atau komunis menolak menjadikan Islam sebagai dasar Negara. Perubahan dalam perjuangan ideologi Islam tidak lagi dilakukan melalui jalur politik tetapi bertransformasi ke jalur dakwah. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan transformasi politik ke jalur dakwah, dengan menggunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. yang menggunakan konsep sejarah pemikiran yakni gerakan perubahan yang

dilakukan sekelompok elit politik dalam perjuangan ideologi dasar negara. Melalui pengungkapan metode sejarah ditemukan hasil penelitian bahwa Masa Orde lama Soekarno mengambil langkah ikut andil dalam kekuasaan pemerintahan yang menimbulkan kontroversi bagi kalangan politisi Islam. Terlihat Masyumi melakukan oposisi dan bersikap menolak terhadap ide Orde Lama. Tindakan ini menurut Soekarno menjadi perintang jalannya proses revolusi. Berdasarkan Penpres No.200 tahun 1960 Soekarno melakukan pembubaran terhadap Masyumi. Perjuangan Islam tidak berhenti melalui wadah politik, tetapi memilih pindah ke jalur dakwah. Pada dasarnya para tokoh Masyumi telah berupaya merehabilitas kembali partai Masyumi masa Orde Baru. Namun pemerintah mengkhawatirkan penggunaan embel Islam dalam politik menjadi penghambat tercapainya stabilitas. Meskipun Partai Muslimin Indonesia telah dibentuk atas izin pemerintah, tetapi masih dirasakan adanya intervensi terhadap Islam. Intervensi inipun diperkuat keterlibatan orang-orang Masyumi dalam PRRI yang dianggap makar oleh pemerintah. Berdasarkan hal ini tidak lain jalan yang ditempuh adalah pindah ke jalan dakwah dengan membentuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dapat disimpulkan pertama bagi orang Masyumi dulu dakwah melalui jalur politik sekarang politik melalui jalur dakwah. Kedua bermula menerapkan Islam melalui formalisasi, melembagakannya melalui partai politik, kearah pergerakan yang menerapkan nilai-nilai Islam tanpa harus melembagakannya melalui partai, karena itu memilih jalur dakwah.

Kata Kunci: Masyumi, Transformasi, Dakwah



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Persoalan ideologi negara menjadi ajang perdebatan di antara partai dan golongan masa awal kemerdekaan (Amalia & Indonesia, 2017; Fadli, 2020; Prasetyo, 2015). Masyumi partai Islam yang kental memperjuangkan Islam sebagai ideologi Negara (Natsir, 1957). Di sisi lain partai nasionalis atau komunis menolak menjadikan Islam sebagai dasar Negara (Ismail, 2017). Dalam perjalanannya Soekarno mengambil langkah ikut andil dalam kekuasaan pemerintahan, dan menimbulkan kontroversi bagi kalangan politisi Islam. Masyumi melakukan oposisi dan bersikap menolak terhadap ide-ide Orde Lama (Jurdi, 2016). Tindakan ini menurut Soekarno menjadi perintang jalannya proses revolusi. Berdasarkan Penpres No.200 tahun 1960 Soekarno melakukan pembubaran terhadap Masyumi (TIM Penulis Tempo, 2011).

Sebagai partai politik Masyumi memiliki keinginan menjalankan syari'at Islam di Indonesia dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan ketatanegaraan (Hasbullah, 2017). Tujuan Masyumi tertuang dalam pasa III yakni *"Terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan seorang, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia menuju keridho'aan Allah"* (Mangkusasmito, 1951). Artinya Masyumi berupaya menerapkan Islam melalui

formalisasi, melembagakannya, yang dalam konteks ini dilembagakan ke dalam bentuk partai politik (Abdillah, 1999; Warjio, 2020). Pada perkembangannya perjuangan partai politik Masyumi tidak mendapat tempat dalam pemerintahan baik masa Orde Lama hingga masa Orde Baru (Madinier, 2015), yang membuat perjuangan Masyumi bergerak dalam jalur dakwah Inilah yang menjadi sorotan penulis, bertujuan mengungkapkan transformasi politik ke jalur dakwah.

Masyumi lahir sebagai partai Islam pada awal kemerdekaan melalui proses yang cukup serius dan dengan kesadaran sejarah (Maarif, 1996a). Kelahiran Masyumi dapat dikatakan sebagai suatu keharusan bagi perjalanan politik umat Islam modern (Madinier, 2015). Melalui Muktamar Islam Indonesia di gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta 7-8 November 1945 dibentuk Masyumi (Prawoto, 1970). Merupakan satu-satunya partai politik Islam di Indonesia yang diputuskan dalam muktamar (Jurdi, 2016; Pantapraja, 2021). Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia (Azis Thaba, 1996), yang diketuai pada periode awal adalah Hasyim Asy'ari (Boland, 1985).

Sebagai masyarakat berbhineka, partai Islam dengan segenap aspek ideologis Islam yang melekat menjadi oposisi bagi partai nasionalis, komunis sosioalis (Latif, 2006). Konflik ideologis tentang dasar negara terus berlangsung belum mencapai keberhasilan. Masalah Ideologis menjadi perdebatan sengit antara golongan Islam dan nasionalis (Maarif, 2021). Gagasan dari golongan Islam memperjuangkan Islam sebagai landasan kehidupan berbangsa. Sebagian golongan lain menghendaki adanya pemisahan antara negara dan agama (Yamin, 1959). Konsep ini tetap menjadi perdebatan yang panjang dan cukup alot melalui perjuangan partai politik (Marzuki, 2022). Konflik menyangkut ideologi belum berakhir. Supomo dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI mengakui:

“Memang di sini terlihat ada dua faham, yaitu faham dari anggota-anggotanya ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain sebagai telah dianjurkan oleh tuan Muhammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan bukan negara Islam (Tanjung, 2007).”

Sejalan dalam polemik ideologi, tanggal 3 November 1945 keluar maklumat pemerintah No. X tentang anjuran membentuk partai-partai politik (Kahin, 1980). Dilihat dari sudut ideologis partai tersebut terdiri dari, pertama ideologi Islam yang diwakili oleh Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia

(PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia (Perti) dan Nahdatul Ulama. Kedua, ideologi nasional diwakili oleh PNI. Ketiga ideologi Marxis-Sosialis diwakili oleh Partai Sosialis, PKI, dan Partai Buruh Indonesia 8 November 1945 (Azis Thaba, 1996). Sebagai realisasi sistem Demokrasi di Indonesia dilaksanakan pemilu 1955 yang hasilnya tetap beranjak dari 3 aliran utama yaitu Islam, Nasionalisme, dan Komunisme-Sosialis (Argenti, 2017). Pemilu ini melahirkan empat partai besar yaitu PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, dan PKI 39 kursi (Ricklefs, 2007).

Menurut Soekarno besarnya peranan partai dalam demokrasi parlementer, merupakan penyebab munculnya berbagai perbedaan pendapat. Akibatnya akan sulit tercapai suatu konsesus dan cenderung terpecah belah (Chandranegara & SH, 2021). Praktik politik yang berkembang dalam sistem ini diwarnai oleh konflik politik dan ideologi. Soekarno menghendaki para pemimpin politik mempertimbangkan menguburkan partai politik (Liddle, 1992). Kondisi yang cukup pelik mengakibatkan Soekarno tampil ikut serta dalam kekuasaan pemerintahan. Ditandai dengan keluarnya Dekrit Presiden yang pada gilirannya melahirkan sistem politik baru yang disebut Demokrasi Terpimpin (Indrajat, 2016; Nugroho, 2012).

Kebijakan Soekarno menimbulkan kontroversi bagi kalangan politisi Islam. NU, PSII, dan Perti ambil bagian dan hanyut dalam permainan Soekarno. Masyumi melakukan oposisi dan bersikap menolak. Ahmad Syafii Maarif mengungkapkan bahwa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin mengakibatkan adanya proses kristalisasi antara pendukung dan penentang (Maafi, 2014; Maarif, 1996b). Secara makro siapa yang mendukung dibiarkan hidup, dan yang menentang harus disingkirkan. Sedangkan secara mikro di kalangan umat Islam proses kristalisasi menjadi kenyataan. Pihak yang ikut dalam sistem politik Soekarno dapat turut serta dalam jaringan politik Demokrasi Terpimpin. Sedangkan pihak yang melawan, bukan saja disingkirkan dari lembaga-lembaga politik formal tetapi juga partai mereka dibubarkan (Maarif, 1996b).

Masyumi merupakan salah satu partai yang menolak terhadap ide Demokrasi Terpimpin. Masyumi memandang keikutsertaan dalam sistem politik itu sebagai otoriter dan penyimpangan dari ajaran Islam. Masyumi berpandangan bahwa sistem ini menerapkan praktik-praktik otoriterian dalam pemerintahan. Hal itu karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Partai-partai Islam yang akomodatif terhadap Demokrasi Terpimpin adalah sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip perjuangan Islam (Romli et al., 2006).

Masyumi merupakan partai politik Islam yang memperjuangkan (politik) umat Islam di Indonesia. Anggaran dasar Masyumi tertuang dalam tujuannya agar terlaksananya ajaran hukum Islam dalam kehidupan secara individu, masyarakat dan negara yang diridhai Allah. Melalui cara ini Masyumi ingin menciptakan Indonesia yang bercorak Islam (Maarif, 1996b).

Penolakan Masyumi terhadap sistem Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai kekuatan yang merintang jalan proses politik Soekarno (Ahmad, 2013). Soekarno menyatakan bahwa golongan modernis terutama Masyumi tidak layak hidup pada Demokrasi Terpimpin (Ahmad, 2013). Melalui jargon komunisnya Soekarno menganggap mereka adalah golongan kepala batu. Suatu jargon yang populer dalam kamus politik Soekarno. Soekarno mengambil tindakan dan mengeluarkan keputusan Presiden untuk pembubaran Masyumi tahun 1960 (Notosusanto & Poesponegoro, 1975; Nurdamarsah, 2018). Soekarno menghubungkan perintah pembubaran partai ini dengan moral revolusi. Kelompok ini merintang jalan penyelesaian revolusi. Ia menegaskan:

“... Berdasarkan moral revolusioner dan moralnya revolusi, maka penguasa wajib membasmi tiap-tiap kekuasaan, asing ataupun tidak asing, pribumi ataupun tidak pribumi, yang membahayakan keselamatan atau berlangsungnya revolusi. Sukarno juga mengatakan bahwa pendapat Mahkamah Agung juga berpendirian bahwa Masyumi dan PSI terkena oleh penetapan Presiden No.7/1959 mengenai hak hidup partai-partai tertentu yang dituduh turut serta dalam pemberontakan (Soekarno, 1964)”

Perjuangan politik Masyumi telah dibubarkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Sebagian tokoh Masyumi ini tidak mau larut terhadap kekecewaan politik tersebut. Mereka mendirikan wadah perjuangan baru dalam bentuk lain yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Dt. Rajo Angek & Hasanuddin, 2002). Dakwah sebagai wadah perjuangan adalah alternatif lain sesudah perjuangan melalui politik dibubarkan oleh pemerintah Soekarno melalui Penpres No. 200 tahun 1960 (MUI, 1991). Tokoh Masyumi M. Natsir dalam suatu ungapannya bahwa “Dulu dakwah melalui jalur politik, sekarang politik melalui jalur dakwah (Hakiem, 1997).

Pembubaran Masyumi sebagai partai yang berciri Islam merupakan titik awal proses transformasi sosial politik Indonesia. Jalur politik sudah tidak

dapat ditempuh maka perjuangan umat Islam dilakukan melalui jalur dakwah. Logika mereka adalah perjuangan Islam melalui politik adalah ibadah, maka masih banyak dilakukan ibadah dalam bentuk lain. Oleh karena itu Masyumi tidak diberikan izin untuk berdiri pada masa Orde Baru maka dialihkan dalam bentuk dakwah. Ini menjadi ketertarikan penulis untuk menganalisis dan mengkaji secara lebih komprehensif tentang “Perpindahan Politik Praktis ke Jalur Dakwah”. Sepanjang perjalanan sejarahnya Masyumi dalam politik praktisnya menjadikan politik itu sebagai jalur dakwah. Selanjutnya bubarnya Masyumi dalam politik praktis, perjuangan pun dapat dipindahkan ke jalur dakwah yakni Dewan Dakwah Islamiah Indonesia. Inilah ungkapan tokoh Masyumi yang menunjukkan kekuatan membangun ideologi Islam, yakni Dulu dakwah melalui jalur politik, sekarang politik melalui jalur dakwah

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini mengkaji tentang perpindahan politik Masyumi ke jalur dakwah di Indonesia tahun 1960-1967. Bagaimana kaum elit politik melakukan transformasi dari politik praktis ke jalur dakwah?

Lingkup waktu pembahasan meliputi tahun 1960-1967. Penentuan lingkup ini berdasarkan pertimbangan bahwa tahun 1960, adalah sebagai awal dibubarkannya Masyumi dalam kancah politik praktis. Tahun 1967 awal terbentuknya Dewan Dakwah Islamiah Indonesia sebagai perjuangan umat melalui jalur dakwah. Batasan spasial/tempat dalam penulisan ini meliputi daerah Jakarta sebagai pusat daerah kancah politik praktisnya Masyumi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisa perjuangan umat dari kancah politik praktis (Masyumi) ke jalur dakwah (Dewan Dakwah Islamiah Indonesia). Analisa ini akan memperlihatkan gejolak kontekstual sosial politik pada zamannya, akhir Orde Lama hingga awal Orde Baru. Akibatnya memperlihatkan politik Masyumi bertransformasi ke jalur dakwah. Dengan demikian terjadi perubahan politik ulama dari politik praktis ke arah pembinaan umat melalui dakwah.

Perjuangan ideologi Islam dalam perjalanan sejarahnya selama ini dilakukan melalui politik praktis. Saat berada di jalur dakwah, perjuangan ideologi itu tetap hidup, berkembang dan bahkan mengalami kemajuan. Sebab telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Baik segi pendidikan, sosial, ekonomi, agama, dan budaya memberikan pesan-pesan Islami dalam relevansinya dengan kehidupan sekarang. Pesan Islami yang dimaksud bahwa cita-cita besar perjuangan para pendahulu terhadap Islam menjadi pembelaran bagi generasi berikutnya. Hal ini memberikan harapan agar dapat membentuk karakter anak bangsa, penanaman nilai-nilai moral dan perjuangan, serta kesadaran nasionalisme yang landasi dengan ghirah Islam. Dengan demikian

diharapkan bagi generasi dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan hari ini dapat diselesaikan dengan karakter dan moral yang baik. Penanaman ini perlu dilakukan sejak dini terutama melalui pendidikan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan pengkajian ini mengingat sumbangannya terhadap kehidupan hari ini. Pesan-pesan Islami dalam perjuangan sejarahnya menjadi penting dikaji secara lebih komprehensif, yang akan memberikan cerminan pembelajaran dalam kehidupan kekinian.

Penelitian yang menyangkut politik praktis Masyumi telah ditemukan dalam berbagai bentuk penulisan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dikaji dan diteliti pada pendekatan keilmuan yang berbeda yang dalam dimensi waktu dan pada tempat yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan memusatkan kajiannya tentang perpindahan politik (Masyumi) ke jalur dakwah (Dewan Dakwah Islamiah Indonesia). Yakni menganalisa perjuangan ideologi yang berawal dari kancah perpolitikan (politik Masyumi), yang dalam perkembangannya berpindah ke jalur dakwah (Dewan Dakwah Islamiah Indonesia).

Beberapa penelitian yang menyangkut politik Masyumi di antaranya, Artha Wijaya dalam bukunya *Belajar dari Partai Masyumi* (Artawijaya, 2014), mengungkapkan Masyumi sebagai partai Islam memperjuangkan syari'at dalam kehidupan berbangsa. Perjuangan untuk mewujudkan Islam telah mulai dicetuskan sebelum kemerdekaan. Yakni dalam mendirikan *Jong Islamietend Bond* (Perhimpunan Pemuda Islam). Ini adalah wadah organisasi kekuatan Islam merebut kemerdekaan atas imperialisme. Wijaya mengungkapkan sepak terjang Masyumi memperjuangkan dasar dan syari'at Islam berjalan dalam kehidupan berbangsa. Sebab ini adalah landasan cita-cita umat Islam ketika berjuang sekuat tenaga bagi kemerdekaan. Oleh karena itu Wijaya mengemukakan beberapa tokoh serta bentuk perjuangan yang dilakukan dalam menjadikan Islam sebagai landasan berjuang. Cita-cita kemerdekaan inilah yang menjadi pembeda dengan perjuangan umat sekarang. Dan strategi dalam Masyumi dalam menghadapi kancah politik praktis dalam menghadapi masyarakat.

Modernisme dan fundamentalisme dalam Politik Islam Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-Islami (Pakistan) oleh Yusril Ihza Mahendra (Mahendra, 1999). Tulisan ini memfokuskan kajiannya dalam komparasi partai Islam yang ada di Indonesia dengan Pakistan. Masyumi sebagai politik Islam Indonesia yang tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan politik lainnya, karena sifatnya yang lebih modernis, namun mengalami kesulitan untuk dapat terlibat dalam pemerintahan. Partai Jamaat Islami juga merupakan politik Islam modernis di Pakistan, namun pergerakan

mereka lebih dapat diterima dalam pemerintahan. Oleh karena itu Mahendra melihat *culture* kebudayaan setempat yang mempengaruhi jalan dan perkembangan politik Islam. Sedangkan kajian tulisan ini melihat komparasi politik Islam dan signifikansinya dalam masing-masing pemerintahan sebagai politik modernis. Kekhasan dalam penelitian ini hanya melihat perjuangannya di Indonesia, namun sudah berpindah ke dalam bentuk dakwah. Inilah yang akan sorotan dalam penelitian ini.

Kajian *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* oleh Syafi'i Ma'arif (Maarif, 1996b), mengungkapkan perjalanan politik Islam pada permulaan periode pasca kemerdekaan. Yakni perkembangan politik Masyumi sejak awal pembentukannya hingga mengalami penyurupan dan bubar. Ma'arif menerangkan cita-cita pembentukan Masyumi berawal dari aspirasi umat Islam untuk menyatukan seluruh aspirasi umat. Oleh karena itu berbagai organisasi-organisasi Islam tergabung dalam satu wadah yakni Masyumi. Tidak hanya itu, Ma'arif juga mengungkapkan bahwa umat telah sampai kepada kesadaran politik. Berawal dari aspirasi ini hingga sampai kepada kesadaran politik praktis. Yakni pembentukan partai dengan nama Masyumi. Melalui wadah politik dengan maksud dapat menyalurkan perjuangan Islam. Masyumi dijadikan sebagai wahana perjuangan politik Islam dengan berbagai prestasi politik yang digapainya, selanjutnya partai Masyumi mengalami kegagalan dan dibubarkan. Terlihat bahwa dalam uraiannya lebih menekankan kepada kronologis dan *causalitas* sebuah peristiwa sejarah. Yakni perjalanan politik Masyumi sejak pembentukannya hingga mengalami kemunduran. Dalam buku ini tidak terlihat suatu analisa tentang perpindahan politik Masyumi ke jalur dakwah sebagaimana yang akan penulis teliti.

Remy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Integralism*. mengungkapkan bahwa, para tokoh Masyumi menarik untuk dipelajari kelompok negara barat. Terutama konsep tentang *Negara dan Bangsa* yang ditulis oleh pemikir Masyumi M. Natsir. Di dalamnya tertuang tentang Demokrasi dan persatuan. Hal lain yang diungkapkan oleh Madinier adalah adanya persatuan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Persatuan ini mengakibatkan Masyumi adalah sebagai partai terkuat. Dengan cita-cita menghidupkan masyarakat Islam. Dengan demikian hanya terfokus pada bentuk implementasi politik Masyumi dan pemikir/tokoh besar Masyumi (Madinier, 2015). Kajian Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia masa Orde Lama oleh Gili Argenti yang memfokuskan melihat Masyumi pada perdebatan konstituante. Argenti mengungkapkan adanya pergeseran ideology Masyumi sedikit dari ideology bercorak formalis kearah subtansi. Tulisan Fadli dalam Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa

Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Malenggang, PSII Bimbang oleh Muhammad Rijal Fadli. Ia melihat perbandingan partai politik Islam pasca dibubarkan masa Orde Lama. Masyumi sebagai partai oposisi sedangkan NU bersikap mendukung sehingga mendapatkan kejayaan politik masa demokrasi terpimpin (Fadli, 2020). Periode politik masa ini juga tidak lepas dari periode sebelumnya masa Pemerintahan Belanda. Merunut kembali masa sebelumnya kebijakan politik pemerintahan Belanda dalam mekonstruksi masyarakat majemuk, membentik kelompok-kelompok dan kelas sosial dapat dilihat dalam tulisan Mestika Zed *Warisan Penjajahan Belanda di Indonesia Pasca Kolonial Perspektif Perubahan dan Kesenambungan* (Zed, 2017).

Metode

Penelitian transformasi politik ke jalur dakwah merupakan sebuah gerakan pemikiran yang dilakukan oleh sekelompok elit politik yang bermula keterlibatannya dalam politik praktis (Masyumi), dan berujung memilih pindah jalur dakwah. Oleh karena itu kajian transformasi politik ke jalur dakwah dapat di analisis melalui konsep sejarah pemikiran. Sejarah pemikiran pada dasarnya adalah semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi pemikiran. Misal gerakan koperasi dipengaruhi oleh pemikiran M. Hatta, gerakan pendidikan Taman Siswa dipengaruhi oleh pemikiran K.I Hajar Dewantara, dan gerakan Muhammadiyah dipengaruhi oleh pemikiran Ahmad Dahlan (Kuntowijoyo, 2008). Selanjutnya gerakan transformasi politik Masyumi untuk memilih pindah ke Jalur dakwah dipengaruhi oleh para tokoh Masyumi.

Sejarah pemikiran dapat pula disebut tela'ahan tentang pengaruh pemikiran mereka terhadap kehidupan manusia pada masanya, atau pada periode kemudian. Terlihat pengaruh pemikiran politik Masyumi pada masa setelahnya (Orde Lama) adalah berupaya menghidupkan kembali partai Masyumi masa Orde Baru. Tahun 1960 Masyumi dibubarkan lalu bertransformasi ke DDII. Artinya pembangunan umat dan perjuangan ruhul Islam untuk selanjutnya tidak lagi dilakukan melalui politik praktis tetapi lapangan dakwah. Transformasi 'politik' ke 'dakwah' melahirkan Dewan Dakwah.

Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan *Historiografi* (Gottschalk, 2008). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yakni menggunakan strategi dan studi kepustakaan (Hendri, 2017). Berupa sumber tertulis yakni arsip, Risalah Persidangan MPRI RI pidato Natsir, dan sumber sekunder berupa hasil-hasil

penelitian berupa jurnal dan buku yang relevan dengan kajian penulis. Selanjutnya dilakukan kritik sumber. Menganalisis terhadap segala sumber-sumber yang telah dikumpulkan, Selanjutnya melakukan interpretasi terhadap sumber yang telah dikritik dan dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah dalam karya ilmiah. Data-data yang telah diperoleh dikritik dan dianalisis untuk memastikan otentitas/keaslian dan keutuhan/integritas sumber dan menentukan kesahihan (kredibilitas) sumber, sehingga mendapatkan fakta sejarah. Data yang dianalisis menggunakan analisis prosesual sebagai esensi uraian historis, yakni menggambarkan bagaimana kronologis perjuangan politik praktis Masyumi hingga bubar pada masa akhir Orde Lama, kemudian pindah memilih jalur dakwah, yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia hingga menyebar keseluruh pelosok nusantara. Kemudian bagaimana pindahnya politik Masyumi ke jalur dakwah yang ditempuh. Analisis struktural yang terwujud pada pola dan sikap seseorang sebagai pengendap sifat, watak, dan nilai-nilai yang dihayati oleh pribadi para tokoh (personality) (Kartodirdjo, 1992). Sumber yang sudah dikritik dan mendapatkan fakta sejarah dikelompokkan menurut topik yang sudah ditentukan (Kuntowijoyo, 1995). Langkah terakhir adalah penulisan, yang akan merekonstruksi fakta sejarah secara keseluruhan yang merupakan tujuan akhir dari penelitian ini (Karima et al., 2021).

Sehubungan dengan metode sejarah di atas, penelitian ini akan memakai pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis akan mengungkapkan unsur-unsur sosial dalam suatu deskripsi peristiwa sejarah. Akan mengekstrapolasikan jenis aspek sosial dan gejala sejarah yang dikaji. Seperti struktur sosial, jaringan interaksi, pola kelakuan dan sebagainya. Terkait dengan penelitian ini, perpindahan politik Masyumi ke jalur dakwah akan dilihat dari struktur-struktur sosial, sehingga terungkap gejala sejarah berpindahnya politik praktis Masyumi ke jalur dakwah.

Pendekatan sosial kemasyarakatan akan menganalisa terjadinya berbagai ideologi. Transformasi politik praktik Masyumi ke jalur Dewan Dakwah Islamiah Indonesia merupakan sebuah ideologi cita-cita perjuangan umat. Ideologi berarti sebagai bentuk pikiran untuk melegitimasi suatu kepentingan atau tujuan kelompok. Atau suatu pembenaran posisi sosial kelompok itu. Dengan demikian pendekatan sosiologi sangat relevan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk ideology (Kartodirdjo, 1992).

Selanjutnya kajian penelitian ini akan dapat diungkapkan melalui pendekatan politik. Pendekatan politik menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para aktor dalam interaksinya serta peranannya dalam usahanya

memperoleh “Apa, kapan dan bagaimana”, masuk dan bermain dalam kancah perpolitikan.

Hasil dan Pembahasan

Kemelut Masyumi Masa Orde Baru

Strategi pembangunan Orde Baru adalah marginalisasi peranan partai-partai politik, pengibiran parta-partai pilitik Islam (Rofiq, 2016) dan menabukan pembicaraan masalah ideologi. Sisi lain keberhasilan pembasmian terhadap PKI masa Orde Lama, muncul optimisme di kalangan untuk kembali memainkan peranannya dalam politik pemerintahan, namun keinginan tersebut tidak dapat dipertahankan (J. Benda, 1980). Selanjutnya ini pula yang disebut sikap ambivalen pemerintaan terhadap muslim (Kuntowijoyo, 2008). Persoalan ideologi pun kembali lagi mencuat setelah ABRI dan sejumlah golongan Islam yang anti Komunis dan berhasil menumbangkan PKI.

Masa Orde Baru timbul semacam romantisme kebangkitan politis Islam. Kemenangan Orde Baru dianggap sebagai kemenangan Islam sehingga tidak mengherankan apabila ada kalangan tokoh Islam yang merindukan merehabilitas kembali politik Islam terwujudnya Negara Islam (Azis Thaba, 1996). Kelahiran Orde Baru sebagai idealisme demokrasi, memberikan harapan besar kepada umat Islam untuk kembali berperan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Ada tugas penting yang harus dilakukan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya sesudah tumbangnya rezim orde lama dan tegaknya kekuasaan Orde Baru – yang bertekad menegakkan keadilan dan kebenaran – yakni memulihkan hak-hak asasi warga negara yang sejak bertahun-tahun tidak dibiarkan eksis oleh rezim Orde Lama. Antara lain hak asasi warga negara untuk berkumpul (Harjono, 1995). Dalam konteks ini adalah pembubaran terhadap partai oposisi yang dilakukan selama masa pemerintahan Orde Lama, yang seharusnya partai tersebut menyuarakan aspirasi rakyat.

Banyak tokoh Islam yang bercita-cita ingin mengaktifkan kembali partai-partai Islam. Di antaranya Moh. Hatta bersamaan dengan HMI dan PII ingin mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (Iqbal, 2015). Upaya ini menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat dan pemerintah menolak berdirinya partai Islam ((Maryani et al., 2022). Sebagai seorang proklamotor Moh. Hatta bersusah payah mendirikan partai politik. Bagi yang mendukungnya bahwa sebagai seorang demokrat sejati tentunya perlu

mendirikan partai politik untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya (Noer, 1990).

Untuk mewujudkan pendirian PDII, Moh. Hatta mengirim surat kepada Soeharto atas keinginannya tersebut. Pemerintah tidak memberikan izin untuk pendirian partai tersebut. Mereka khawatir akan membawa bahaya ekstremisme dan terjadinya oposisi politik (Kuntowijoyo, 2008). Pada 5 Februari 1967 melalui Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM), pemerintah mengizinkan berdirinya partai politik baru. Akan tetapi tidak mengizinkan orang Masyumi masuk dalam kepengurusan (Kuntowijoyo, 2008). Orde Baru seolah-olah cukup khawatir dengan representatif politik Islam dimasa yang akan datang (Effendy, 1998).

Bagi keluarga Masyumi tidak lain adalah memulihkan kembali partai Masyumi ditengah-tengah barisan Orde baru. Itulah sebabnya oleh anggota-anggota pimpinan partai masyumi pada waktu dibubarkan yang berada di luar penjara dalam satu pertemuan dengan panglima militer Jayakarta selaku penguasa perang, telah dipergunakan untuk menyampaikan surat yang berisi pernyataan hasrat umat Masyumi direhabilitas. Surat tersebut ditanda tangani oleh K.H Fakhri Usman, H. Hasan Basro dan Nawar Harjono, serta disampaikan pada tanggal 9 Mei 1966 (Harjono, 1995). Setelah pimpinan-pimpinan Masyumi yang berada dalam penjara dibebaskan, perjuangan merehabilitas Masyumi diteruskan dan secara formal dibentuk panitia Rehabilitas Masyumi yang diketahui oleh saudara Drs. Syarif Usman, dan terdiri dari semua organisasi kemasyarakatan Islam yang belum berafiliasi kepada sesuatu partai politik.

Selain didukung oleh organisasi kemasyarakatan Islam perjuangan merehabilitas Masyumi pun mendapat simpati dari kalangan luas dalam masyarakat, khususnya dari kalangan kesatuan-kesatuan aksi, demikian juga persatuan sarjana hukum Indonesia. Lebih dari itu pendekatan-pendekatan informal dengan kalangan penguasa, telah menghasilkan suasana saling pengertian yang membesarkan hati. Tidak berlebihan kiranya kalau juga saya sampaikan bahwa pembicaraan mengenai pengisian lembaga-lembaga perwakilan rakyat, baik di pusat maupun di daerah- daerah secara informal pun sudah dilakukan dengan kalangan penguasa. Sebagai encer-encer, dapat dipergunakan imbangannya keadaan hasil pemilihan umum 1955 yang lalu. Akan tetapi sebagaimana lazimnya undang-undang perjuangan, yang berjuang bukan saja keluarga Masyumi, yang pro Masyumi dan demua yang pro tegaknya keadilan dan kebenaran. Mereka yang tidak setuju rehabilitas Masyumi pun berjuang pula, nota bene tidak kurang gigihnya dari mereka yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Demikianlah maka setelah melalui gelombang pasang naik dan pasang surut perjuangan yang kerap kali diikuti dengan perasaan-perasaan yang mendebarkan, maka ketua presidium kabinet Ampera, Jenderal Soeharto, dalam suratnya kepada pak Prawoto Mangkusasmito, tertanggal 6 Januari 1967 menyatakan:

1. Alasan-alasan yuridis, ketatanegaraan dan psikologis telah membawa ABRI pada suatu pendirian, bahwa tidak dapat menerima rehabilitas bekas partai politik Masyumi
2. Mengenai eks anggota Masyumi sebagai warga negara, tetap dijamin hak-hak demokrasiya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Harjono, 1995).

Nampak dalam perjalanan sejarahnya, sejak Masyumi dibubarkan pada masa Orde Lama ghirah menghidupkan Islam tak terhenti sampai disini saja. Upaya menghidupkan kembali Islam dalam berbangsa muncul pada masa Orde Baru (Luth, 1999). Harapan besar ini dilandaskan mengingat sejumlah elemen masyarakat yang anti terhadap Komunis sehingga tidak dibiarkan berkembang. Hal ini berakhir pada penumpasan terhadap pemberontakan Gerakan 30 September PKI di Madiun. Berdasarkan hal ini ada suatu harapan dari sejumlah kalangan Muslim untuk merehabilitas kembali Masyumi sebagai partai Islam yang menyalurkan aspirasi Rakyat (Budiwanti, 2000). Akan tetapi harapan ini berubah menjadi kekhawatiran dari Orde Baru akan terjadinya kembali upaya ekstrem dari kalangan Islam. Akibatnya Orde Baru tidak menerima rehabilitas Masyumi (Syamsuddin, 1991).

Parmusi sebagai Rehabilitas Masyumi

Sebagaimana yang telah diutarakan Islam politik masa Orde Baru. Terlihat upaya untuk menghidupkan kembali Islam melalui partai politik Masyumi mengalami kegagalan. Pada kenyataannya perjuangan kelompok Islam tidak berhenti saat partai Masyumi dibubarkan (Suwito, 2017). Muhammad Hatta telah mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia tahun 1966. Usaha ini gagal karena Soeharto menolak pendirian PDII (Syamsuddin, 1991). Penolakan ini didasarkan soeharto menganggap bahwa gagasan ini tidak bersifat positif. PDII tidak akan mampu mengakomodasi semua kekuatan Islam di luar partai-partai Islam yang ada. Gagasan ini hanyalah menunjukkan sulit tercapainya stabilitas (Noer, 1990).

Sejalan dengan itu dari kalangan Muhammadiyah muncul ide untuk mendirikan partai Islam Indonesia. Di sisi lain oleh sebagian Muhammadiyah tidak menyetujui ide tersebut, tetapi lebih mendukung sepenuhnya upaya merehabilitas Masyumi. Pendirian partai Islam baru memanglah dirasa penting

oleh kalangan elit modernis. Sedari awal mulai dari keinginan untuk merehabilitas Masyumi hingga pembentukan partai-partai Islam baru telah dilakukan umat. Tujuan pembentukan partai ini untuk mengakomodasi aspirasi politik umat.

Cita-cita umat menjadikan Islam dalam asas hidup bermasyarakat terus diperjuangkan melalui politik. Tanggal 7 Mei 1967 melalui Badan Koordinasi Amal Muslim mengambil keputusan membentuk wadah politik baru. Inilah Parmusi yang dibentuk tanggal 5 Februari tahun 1968 (Mintaredja, 1968). Parmusi sebagai wadah politik bagi umat Islam yang belum tersalurkan aspirasinya. Hal ini dimaksudkan umat Islam baik yang resmi bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang ada, maupun orang-orang eks Masyumi dijamin hak asasinya sebagai warga negara yang demokratis. Akan tetapi Soeharto menegaskan larangan untuk tampilnya eks pimpinan Masyumi dalam struktur kepengurusan Masyumi.

Pembentukan Parmusi berawal dari pada tanggal 30 Juni 1967 kaum elit politik modernis mengirim surat resmi pertama yang ditujukan kepada pemerintah. Surat itu berisi pernyataan hasrat umat untuk membentuk wadah politik baru bagi umat Islam. Yakni dengan nama Partai Muslimin Indonesia, Parmusi. Surat panitia tujuh disambut baik oleh pemerintah. Tanggal 24 Juli 1967 dimulailah pertemuan pertama antara panitia tujuh dengan staf pejabat presiden yang dikuasakan untuk itu supaya mengadakan peninjauan umum tentang kemungkinan- kemungkinan dirangkannya Partai Muslimin Indonesia. Bahwa Partai Muslimin Indonesia yang disingkat Parmusi ini akan menjadi wadah bagi mereka yang belum tersalurkan aspirasi politiknya ke dalam sesuatu partai politik yang ada. Pada garis besarnya mereka dapat ditemukan

- a. Yang resmi menjadi anggota organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang ada.
- b. Yang secara individual belum terkait pada salah satu organisasi yang pada umumnya adalah bekas-bekas anggota Masyumi (Sulastomo, 2008).

Tanggal 5 Februari 1968 Soeharto menerima para pendukung pembentukan Partai Musliman Indonesia di Istana Negara. Pembentukan Parmusi didukung oleh organisasi-organisasi Islam. Adapun yang hadir saat itu Djarnawi Hadikusumo, Daris Tanim, H. Hasjim, H.M.S Mintaredja (dari kalangan Muhammadiyah), Agus Sudono, Usman Ibrahim (Mewakili Gasbindo), Moezir Ahmadyans, Daud Badrudin (mewakili KBIM), Udin Sjamsuddin (mewakili Jami'atul Wasliyah) (Mintaredja, 1968). Soeharto mengakui adanya ormas-ormas Islam yang belum berafiliasi pada salah satu partai politik atau belum dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Parmusi

adalah wadah untuk umat, tetapi Soeharto juga menegaskan para eks pimpinan Masyumi untuk tidak ambil bagian dalam struktur Parmusi.

Terkait hal di atas Partai Muslimin Indonesia tidak dapat diartikan juga sebagai rehabilitasi Masyumi dengan cara lain. Cukup dengan menyetir rumusan Mr. M Roem yang dalam menjawab pertanyaan salah seorang wartawan Belanda, telah menjawab dengan tepat “memang partai Masyumi tidak direhabilitir, tetapi semua anggota Masyumi masuk dalam partai baru ini yakni Partai Muslimin Indonesia.

Memilih Jalur Dakwah

Dewan konstituante yang membicarakan persiapan dasar negara, menjadi perdebatan sengit antara golongan Islam dan nasionalis. Gagasan dari golongan Islam menghendaki agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Sebagian kalangan nasionalis menghendaki adanya pemisahan antara negara dan agama. Gagasan mengenai Islam sebagai dasar negara yang dicita-citakan sebenarnya bukanlah realisasi konsep negara Islam. Lebih tepatnya adalah adanya jaminan terhadap pelaksanaan syari’at ajaran-ajaran Islam (Azis Thaba, 1996). Konsep ini tetap menjadi perdebatan yang panjang dan cukup alot melalui perjuangan partai politik.

Partai politik Masyumilah yang cukup getol memperjuangkan dan menjadikan Islam agar terlaksana dalam berbangsa. Berbagai upaya yang telah diperjuangkan politik praktis Masyumi. Jatuh bangun partai politik Masyumi untuk menyuarakan kehendak rakyat menjadikan Islam dalam kehidupan berbangsa. Mulai partai ini dibubarkan masa Orde lama hingga merehabilitasi kembali masa Orde Baru. Selama itu pula para tokoh Islam membentuk partai Islam yang baru, dan disisi lain para pejuang yang menyuarakan Islam menyetujui untuk rehabilitasi Masyumi (Firza, 2017).

Kekuatan-kekuatan sosial politik menciptakan ketegangan ideologi politik Masyumi untuk berupaya eksis dan menghidupkan kembali partai Islam. Bila dilihat politik Masyumi, maka penulis berasumsi kekuatan-kekuatan yang muncul adalah *pertama*, Islam sebagai agama, sejak awal telah memiliki kekuatan perjuangan dan semangat ghirah untuk lepas dari penjajahan Imperialisme. Hal ini terlihat dalam sejarahnya organisasi dan perkumpulan-perkumpulan Islam dibentuk dalam rangka mencapai kemerdekaan. Perjuangan dan kekuatan Islam cukup mendominasi dalam mencapai kemerdekaan. *Kedua*, kekuatan kepentingan untuk menjadikan ideologi Islam sebagai asas negara adalah sebagai akibat perjuangan yang telah dilakukan dalam mencapai kemerdekaan. Pengaruh kekuatan-kekuatan sosial politik inilah mengakibatkan terciptanya ketegangan antara politik Masyumi dengan

praktik yang berkembang. Antara ide yang ada dengan berbagai praktik yang terjadi hingga dibubarkan masa Orde Lama dan mendapat penolakan merehabilitas masa Orde Baru. *Ketiga* landasa Islam structural dalam politik Masyumi, berupaya menerapkan Islam melalui formalisasi, melembagakan melalui partai, dan menerapkan dalam kehidupan bernegara.

Akan tetapi perjuangan itu semua mengalami hambatan dalam pemerintahan. Hambatan ini tentu saja tidak lepas dari berbagai faktor peristiwa yang melingkupi pada zamannya. Seperti halnya dalam sebuah peristiwa sejarah tidak ada faktor yang bersifat tunggal. Sebagai *causal factor* peristiwa, melainkan selalu berkaitan dengan peristiwa lain yang melatarbelakanginya (Syamdani, 2009). Pindahannya politik praktis Masyumi untuk memilih ke jalur dakwah bebrapa faktor permasalahan politik, sosial, dan agama yang mendasarinya. Pertama keterlibatan tokoh masyumi dalam peristiwa PRRI di anggap membahayakan pemerintahan, kedua Masyumi menganggap ideologi komunis bertolak dengan nilai Islam sehingga dianggap tidak mendukung dewan konstituante. Ketiga berupaya menerapkan Islam melalui formalisasi, yakni melembagakannya melalui partai politik merupakan bagian tujuan Masyumi dalam kehidupan bernegara.

Keinginan untuk merehabilitas Masyumi tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan dari pemerintah. Pemerintah melarang untuk membangkitkan kembali Masyumi. Pelarangan ini datang atas desakan dari Angkatan Darat yang melihat bahwa Masyumi pernah melakukan dosa-dosa dimasa lalu terutama berhubungan dengan PRRI (Solichin & Anshori, 2014). Perwira Angkatan Darat menyatakan:

“Tentara akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun dari pihak , dan golongan manapun yang akan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dilakukan oleh pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, Gestapu, Darul Islam dan Masyumi-Partai Sosialis Indonesia” (Romli et al., 2006).

Pelarangan Masyumi dikaitkan dengan PRRI dan juga langkah-langkah Masyumi dalam memperjuangkan dasar negara Islam. Pandangan Angkatan Darat sebagai sesuatu yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan itu tentu saja menyesatkan sebab perjuangan Masyumi dan juga partai-partai Islam lainnya dalam memperjuangkan dasar negara Islam pada waktu itu tidak melanggar dan bertentangan dengan apapun. Apa yang diperjuangkan oleh Masyumi sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa terkandung dalam Pancasila.

Pada 7 April 1967 pemerintah mengizinkan berdirinya Parmusi. Hal ini didasari bahwa partai Islam dan organisasi-organisasi Islam yang ada belum mewadahi aspirasi politik. Meskipun pemerintah mengizinkan berdirinya Parmusi tetapi melarang para pemimpin Masyumi duduk dalam struktur Parmusi. Ketika kongres 4-7 November 1968 di Malang Jawa Timur, telah memilih Roem sebagai ketuanya, tetapi pemerintah tidak merestuinnya. Padahal Roem terkenal sebagai orang yang tidak terlibat dalam PRRI. Sebagai gantinya pemerintah kemudian melalui SK Presiden No.70 tahun 1968 menetapkan Djarnawi Kusuma dan Lukman Harun sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Parmusi (Soegeng, 2012).

Terlihat perjuangan politik Islam masih diberikan kesempatan melalui Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), namun masih ada intervensi dari pemerintah. Oleh karena jalur politik sudah tidak dapat ditempuh maka perjuangan umat dilakukan melalui jalur dakwah. Logika mereka adalah perjuangan Islam melalui politik adalah ibadah, maka masih banyak dilakukan ibadah dalam bentuk lain. Masyumi yang tidak mendapatkan tempat dalam politik praktis masa Orde Baru maka dialihkan dalam bentuk dakwah (Nasar, 2017).

Pembubaran Masyumi sebagai partai yang berciri Islam merupakan titik awal proses transformasi sosial politik Indonesia ke arah negara dan birokrasi. Kepemimpinan dan kutub-kutub kekuatan tidak lagi bersandar pada kekuatan Islam. Gerak umat Islam dan ulama dalam berpolitik tidak hanya melalui partai Islam tetapi melingkupi nilai-nilai pluralisme yaitu nasionalisme. Dengan demikian terjadi perubahan politik ulama dari politik praktis ke arah pembinaan umat melalui dakwah, organisasi dan juga melalui pendidikan di sekolah-sekolah Inilah yang dilakukan pemimpin Masyumi (Afifah, 2018).

Bila ditinjau dari sejarah pemikiran, bahwa perubahan yang berasal dari ide/gagasan para elit politik tidak lepas dari konteks sosial pada zamannya. Perubahan yang dilakukan sebagai bentuk kontradiktif dari konteks lingkungan sosial politik yang mengitari kaum elit. Oleh karena itu elit politik tokoh umat memilih arah pembinaan dakwah. Selain itu konteks sosial lainnya. Bahwa kontradiktif sosial politik berpengaruh terhadap gagasan Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini dimaksudkan tentu saja memperkecil ruang gerak perjuangan umat dalam kancah politik. Bahwa tahun 1983 pemerintah mempercayai bahwa kelompok-kelompok sosial keagamaan dan politik tertentu masih diragukan komitmennya kepada ideologi negara. Pandangan Presiden Soeharto, mereka tidak meyakini Pancasila sepenuhnya sebagai ideology (Kompas, 1980). Untuk itu pemerintah Orde Baru mensosialisasikan Pancasila. Upaya ini dapat dilihat dimasukkannya Pancasila

dalam kurikulum pendidikan dan Penataran Pedoman Penghayatan Pancasila (P4) (Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPR, 1978). Sudut pandang ini diiringi dengan pandangan bahwa sentimen-sentimen ideologis yang berbasis agama turut bertanggung jawab atas terjadinya kekacauan dalam kampanye 1982 (Tempo, 1983). Hal ini mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi politik yang ada, Golkar, PPP, dan PDI.

Berdasarkan hal di atas kebijakan Soeharto yang tidak memberikan izin untuk merehabilitas Masyumi, terlihat bahwa Soeharto bahwa kelompok-kelompok sosial keagamaan dan politik tertentu masih diragukan komitmennya kepada ideologi negara. Pandangan Presiden Soeharto, mereka tidak meyakini Pancasila sepenuhnya sebagai ideology. Oleh karena itu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asa tunggal adalah kebijakan untuk menyamakan konsep ideology. Hal ini pula Masyumi tidak dapat masuk dalam kancah politik praktis dan pindah ke jalur Dakwah. Meskipun pada kenyataannya masih terdapat tokoh dan pejuang Islam yang menolak Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal (Hanif, 2012).

Dalam pidato tahunannya di depan DPR 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto menegaskan bahwa seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila (Suharto, 1985). PPP dan PDI menerima Pancasila sebagai asas tunggal sebagai asas ideologi mereka. Dalam kongres Agustus 1984 PPP mengganti Islam dengan Pancasila sebagai dasar ideologinya. Sebelum pemilihan umum 1987 partai itu mengubah simbolnya dari ka'bah menjadi bintang (salah satu simbol pancasila) (Tamara, 1988). Demikian juga organisasi-organisasi politik yang ada mematuhi keinginan mereka untuk menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Pemerintah Orde Baru mengajak semua organisasi mahasiswa dan sosial keagamaan untuk mengambil langkah yang sama. Ketika Undang-undang keormasan dikeluarkan pada 1985 organisasi-organisasi mahasiswa dan sosial keagamaan Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, HMI, PMII harus menerima Pancasila sebagai asas organisasi mereka (Harun, 1986).

Perkembangan ini mengecewakan masyarakat muslim Indonesia, karena tokoh-tokoh mereka disingkirkan dari arus utama politik bangsa hingga tahap tertentu. Diskurs politik negeri inipun tidak mencerminkan bahwa mayoritasnya muslim. Mereka menganggap bahwa pemerintah Orde Baru telah memperlakukan pemimpin dan aktivis politik muslim terutama yang berasal dari Masyumi. Mereka bisa pahami bahwa politik pengasastunggalan Pancasila sebagai upaya lebih jauh yang sengaja diambil oleh pemerintah untuk melakukan depolitisasi terhadap Islam (Tempo, 1984). Oposisi utama terhadap

pemerintah Orde Baru acap kali muncul dari para pemimpin dan aktivis Islam politik. Hubungan politik di antara kedua belah pihak bersifat antagonis. Hubungan ini masih tetap berlanjut sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an (Effendy, 1998).

Perjuangan politik masyumi dalam dinamika politik orde lama dan Orde Baru membuat Masyumi memilih pindah untuk memilih jalur dakwah (Aritonang, 2004). Bagi Masyumi Dulu dakwah melalui politik sekarang politik melalui dakwah. Artinya Masyumi yang bermula pergerakannya bersifat struktural, berupaya menerapkan Islam melalui formalisasi, yakni melembagakannya melalui partai politik, kearah pergerakan yang menerapkan nilai-nilai Islam tanpa harus melembagakannya melalui partai, karena itu memilih jalur dakwah.

Kesimpulan

Ketegangan ideologi terikat dengan konteks dimana ideologi itu muncul, tumbuh dan berkembang. Ketegangan antara ideologi Masyumi dengan praktik yang berkembang tidak bisa dilihat hanya dari satu faktor tunggal. Sehubungan dengan itu korelasi yang ada antara ide atau alam pikiran dengan sosial pendukungnya juga menjadi determin perjuangan Masyumi. Dalam konteks sosiologi ideology Komunis tidak diberikan ruang dalam pemerintahan hingga terlihat penumpasan G-30 SPKI. Akibatnya muncul ide dan harapan untuk menidirikan partai Islam masa Orde Baru. Soeharto menolak pendirian partai politik Islam dan menolak merehabilitas Masyumi dihidupkan kembali. Keterlibatan tokoh Masyumi dalam PRRI dianggap membahayakan. Selanjutnya dengan jargon politik Orde Baru menjadikan pancasila sebagai asas tunggal sehingga tidak memberikan ruang terhadap peranan Partai-partai politik. Akibat kemelut politik Islam masa Orde Lama hingga Orde Baru Masyumi memilih pindah untuk memilih jalur dakwah. Dengan Semboyan yang terkenal "Dulu dakwah melalui politik sekarang politik melalui dakwah. Artinya Masyumi yang bermula pergerakannya bersifat struktural, berupaya menerapkan Islam melalui formalisasi melembagakannya yakni partai politik, kearah pergerakan yang menerapkan nilai-nilai Islam tanpa harus melembagakannya melalui partai, karena itu memilih jalur dakwah.

Daftar Rujukan

Abdillah, M. (1999). Islam Politik dan Islam Struktural" dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin. *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam Dari Pra-Pemilu'99 Sampai Pemilihan Presiden.*

- Afifah, W. (2018). *Sejarah dan perkembangan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Timur tahun 1967-2018 M* [Doctoral dissertation]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ahmad, Z. M. (2013). Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi 1957-1960. *Indonesian Journal of History Education*, 2(2), 1-14.
- Amalia, L. S., & Indonesia, L. I. P. (2017). Partai dan sistem kepartaian era reformasi. (No Title).
- Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 14.
- Aritonang, J. S. (2004). *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. BPK Gunung Mulia.
- Artawijaya. (2014). *Belajar dari Partai Masjumi*. al-Kautsar.
- Azis Thaba, A. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Boland, B. J. (1985). *Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1970*. Grafitipers.
- Budiwanti, E. (2000). *Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima*. Lkis pelangi aksara.
- Chandranegara, I. S., & SH, M. H. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Dt. Rajo Angek, & Hasanuddin, A. B. (2002). *Profil Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. Abadi.
- Effendy, B. (1998). Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia. (No Title).
- Fadli, M. R. (2020). Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 34-49.
- Gottschalk, Louis. (2008). *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia.
- Hakim, L. (1997). *Menunaikan panggilan: risalah dokumentasi perjalanan 30 tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Nelly Indrayani, Budi Purnomo

Transformasi Politik ke Jalur Dakwah: Studi Analitis Politik Masyumi tahun 1960-1967

- Hanif, F. (2012). *Penolakan Malik Ahmad Terhadap Pancasila Sebagai Asas Tunggal*. [Tesis].
- Harjono, A. (1995). *Indonesia kita: pemikiran berwawasan iman-Islam*. Gema Insani.
- Harun, L. (1986). *Muhammadiyah dan asas Pancasila*. Pustaka Panjimas.
- Hasbullah, M. (2017). *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara*. Prenada Media.
- Hendri, H. (2017). Kebijakan Politik Pendidikan Tinggi Pemerintah Kolonial Belanda Di Indonesia (1920-1942). *Diakronika*, 17(1), 32-44.
- Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978, Tnp (1978).
- Indrajat, H. (2016). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 18(1), 53-62.
- Iqbal, M. (2015). *Pemikiran Politik Islam*. Kencana.
- Ismail, H. F. (2017). *Panorama sejarah Islam dan politik di Indonesia*. IRCiSoD.
- J. Benda, H. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Pustaka Jaya.
- Jurdi, S. (2016). *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Kencana.
- Kahin, G. M. (1980). Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, trans. *Ismail and Zahardum*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Karima, E. M., Basri, W., & Astriani, F. (2021). EDUCATIONAL THEORY APPLICATION IN HISTORY LEARNING. *Santhet:(Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora)*, 5(2), 115-124.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo, D. R. (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka.
- Latif, Y. (2006). *Inteligensia Muslim dan kuasa: genealogi inteligensia Muslim Indonesia abad ke-20*. Mizan Pustaka.

- Liddle, R. W. (1992). *Partisipasi & partai politik: Indonesia pada awal Orde Baru*. Pustaka Utama Grafiti.
- Luth, T. (1999). *M. Natsir, dakwah dan pemikirannya*. Gema Insani.
- Maafi, R. H. (2014). Politik Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin . *Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(1).
- Maarif, A. S. (1996a). *Islam dan politik: teori belah bambu, masa demokrasi terpimpin, 1959-1965*. Gema Insani.
- Maarif, A. S. (1996b). *Islam dan politik: teori belah bambu, masa demokrasi terpimpin, 1959-1965*. Gema Insani.
- Maarif, A. S. (2021). *Percaturan Islam dan Politik*. IRCiSoD.
- Madinier, R. (2015). *Islam and politics in Indonesia: The Masyumi party between democracy and integralism*. NUS Press.
- Mahendra, Y. I. (1999). *Modernisme dan fundamentalisme dalam politik Islam: perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*. Paramadina.
- Majelis Ulama Indonesia. (1991). *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Dewan Pimpinan Majlis Ulama Indonesia .
- Mangkusasmito, P. (1951). *Memperingati 6 Tahun Masyumi*. Hikmah.
- Maryani, H., Tarigan, A. A., & Azmi, A. (2022). *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group.
- Marzuki, I. (2022). *Politik Hukum Islam di Indonesia*. IKAPI.
- Mintaredja, H. M. S. (1968). *Sekilas Sedjarah (memoire) tentang Pemerintah dan Pembentukan Partai Muslimin Indonesia*. Manuskrip. Djakarta: Tanpa Penerbit.
- Nasar, M. F. (2017). *Islam dan muslim di negara Pancasila*. Gre Publishing.
- Natsir, M. (1957). Risalah Persidangan MPR RI, Konstituante Republik Indonesia : Risalah Perundangan Tahun 1957 Sidang ke III. Jilid V. In *MPR RI. as*.

- Noer, D. (1990). *Mohammad Hatta: biografi politik*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Notosusanto, N., & Poesponegoro, M. D. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1).
- Nurdamarsah, T. (2018). POLITIK MASYUMI DI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER 1950-1959. *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 1(1).
- Pantapraja, F. H. (2021). *Kiai-Kiai Khos di Belakang Gusdur*. Dawuh Guru.
- Prasetyo, S. (2015). PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG IDEOLOGISASI ISLAM DI INDONESIA TAHUN 1949-1959. *Avatara*, 3(2).
- Prawoto, S. (1970). *Sejarah Partai Muslimin Indonesia*. Lembaga Pendidikan Islam
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. III*. Serambi.
- Romli, L., Yes, I., & Yes, P. I. (2006). *Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soegeng, S. (2012). *Pedoman Peningkatan Kompetensi Pendidikan Berbasis Karakter*. Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kementerian Pendidikan Nasional.
- Soekarno, K. A. M. T. (1964). *Dibawah Bendera Revolusi, vol. I*. Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bender Revolusi.
- Solichin, M., & Anshori, A. (2014). *Peran Pendidikan Islam Dalam Pusaran Dinamika Bangsa (Analisis Buku Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial Karya Sutrisno dan Muhyidin)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sulastomo. (2008). *Hari-hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru : Sebuah Memoar*. Kompas Media Nusantara.
- Suwito, D. D. P. (2017). *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*. Adhi Sarana Nusantara.
- Syamdani. (2009). *PRRI Pemberontakan atau Bukan*. Media Pressindo.

- Syamsuddin, H. (1991). *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Tamara, M. N. (1988). Sejarah Politik Islam Orde Baru. In *Prisma* (Issue 51).
- Tanjung, A. (2007). *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tempo. (1984, December 29). Robohnya Dinding Politik Islam . *Tempo*.
- TIM Penulis Tempo. (2011). *Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim . Kepustakaan Populer Gramedia-Tempo Publishing*.
- Warjio, W. (2020). *Demokrasi di Era Covid-19*.
- Zed, M. (2017). Warisan penjajahan Belanda di Indonesia pasca-kolonial (perspektif perubahan dan kesinambungan). *Diakronika*, 17(1), 88–103.